

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Satker BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

*Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Kantor Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang didirikan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, Entitas berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok – Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Arah Kebijakan dan strategis Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah:

1. Program pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang yang bertujuan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaannya.
2. Program pemangkuan, pemanfaatan dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional guna meningkatkan upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
3. Program pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian, partisipasi, kesadaran dan kesejahteraan masyarakat didalam dan sekitar kawasan konservasi dalam mengelola kawasan konservasi perairan nasional.

Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan

implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang berkomitmen dengan visi ***“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

Menurut Permen KP Nomor Per. 65/MEN/ 2020 J.O. Permen KP Nomor Per. 37/MEN/ 2021 organisasi Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKN) Kupang terdiri dari : Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Kepala Balai setingkat eselon III, dengan rincian sebagai berikut:

Subbagian Umum ; mempunyai tugas Subbagian Tata Usaha ; mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan pelaporan BKKN;

Kelompok Jabatan Fungsional ; mempunyai tugas melaksanakan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan

kawasan konservasi perairan, serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Modul General Ledger Pelaporan (GL-P) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Pelaporan Keuangan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) terdiri dari Modul General Ledger – Pelaporan (GLP), Modul Aset Tetap dan Modul Persediaan yang dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Modul Aset tetap dan Persediaan adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya

pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam

penyusunan Laporan Keuangan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang adalah sebagai berikut:

**Pendapatan
-LRA**

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**Pendapatan
-LO**

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
 - c) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola

Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar,

aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70
------------------------------	----

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang memperoleh alokasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 25.788.288.000. Anggaran terdiri dari 2 (dua) sumber dana yakni Rupiah Murni senilai 24.147.738.000 dan PNBP TA Berjalan 1.640.550.000. Selama Tahun 2023 telah dilaksanakan 8 kali revisi DIPA dengan detail revisi sebagai berikut:

No.	Revisi ke	Tanggal Pengesahan	DIPA Awal	DIPA Perubahan	Alasan Revisi
1	01	24 Desember 2022	27.161.936.000	27.161.936.000	Pencantuman/Penghapusan/ Perubahan Catatan Halaman IV .A (USULAN <i>AUTOMATIC ADJUSTMENT</i>)
2	02	15 Februari 2023	27.161.936.000	27.161.936.000	- Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA (Updating) - Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
3	03	13 April 2023	27.161.936.000	27.161.936.000	- Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA (Updating) - Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
4	04	11 Juli 2023	27.161.936.000	27.161.936.000	- Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA (Updating) - Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
5	05	30 Agustus 2023	27.161.936.000	28.802.486.000	- Penambahan PAGU PNB senilai 1.640.550.000 - Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan - Volume keluaran (<i>Output</i>) berubah.
6	06	12 Oktober 2023	28.802.486.000	28.802.486.000	- Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA (Updating) - Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
7	07	19 Oktober 2023	28.802.486.000	26.152.486.000	- Penambahan/Pengurangan Alokasi dan/atau Target RO Prioritas Nasional - Pencantuman/ Penghapusan/ Perubahan Catatan Halaman IV .A (Buka Blokir)
8	08	9 November 2023	28.802.486.000	25.788.288.000	- Terdapat pergeseran antar jenis belanja, antar satker dan dalam 1 (satu) satker dalam rangka pemenuhan belanja barang operasional diantaranya untuk pembayaran listrik, pemeliharaan kantor, dan penataan halaman kantor. - Pergeseran anggaran antar satker dalam satu jenis belanja dalam rangka pemenuhan kekurangan gaji dan tunjangan pada Satker BPSPL Denpasar

Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNPB	294.475.000	294.475.000
Jumlah Pendapatan	294.475.000	294.475.000
Belanja		
Belanja Pegawai	8.111.936.000	7.177.738.000
Belanja Barang	15.284.512.000	15.598.450.000
Belanja Modal	3.765.488.000	3.012.100.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	27.161.936.000	25.788.288.000

Realisasi

Pendapatan Rp

2,433,018,634

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp 2,433,018,634** atau mencapai **826.22%** persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp 294.475.000** Rincian pendapatan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	294.475.000	2.369.683.750	804,71%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	62.034.884	
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1.300.000	
Jumlah	294.475.000	2.433.018.634	826,22%

Realisasi Pendapatan Tahun 2023 mengalami kenaikan **55,08** persen dibandingkan Tahun 2022 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	2.433.018.634	1.568.922.226	55,08
Pendapatan Jasa Lainnya			
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya - 425629	2.369.683.750	1.354.608.750	74,93
Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN Iuran Badan Usaha dan			
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin - 425122	62.034.884	154.550.000	(59,86)
Pendapatan Lain-lain			
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu - 425912	1.300.000	59.763.476	(97,82)
Jumlah	2.433.018.634	1.568.922.226	55,08

- 1. Pendapatan jasa lainnya** - Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya (Kode Akun 425629) mengalami kenaikan sebesar 74,93% dibanding tahun 2022. Nominal pendapatan dominan berasal dari pungutan Karcis Masuk Pariwisata Alam Kawasan Konservasi Perairan (Domestik & Mancanegara) beserta Sarana yang dibawa, Tanda Masuk Pendidikan dan Tanda Masuk Penelitian di Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang rentang periode 1 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023.

Peningkatan pendapatan dibanding tahun 2023 disebabkan antara lain:

- Berakhirnya masa pandemic Covid-19 dan beralih ke masa Endemi, sehingga wisatawan bisa dengan mudah melakukan kunjungan ke Indonesia/ Daerah lain. Hal tersebut berdampak signifikan terhadap kunjungan wisatawan ke Taman Wisata Perairan seperti di Gili Trawangan, Matra, Aer dan di Kawasan KKPN Lain seperti Laut Banda dan Raja Ampat (Wayag, Waigeo).
- Penerapan tarif penuh sesuai dengan PP 85 tahun 2021 pasca pandemi per tanggal 21 Desember 2023.
- Komitmen organisasi untuk meningkatkan pendapatan dengan menambah Gerai Pelayanan serta penambahan SDM Tenaga Pelayanan yang ditempatkan pada Pos-pos pintu masuk Kawasan Konservasi Perairan Nasional seperti di TWP Gili Matra, TNP Laut Sawu dan SAP Raja Ampat dan Waigeo Sebelah Barat.

Rekapitulasi Capaian Pendapatan Jasa Lainnya sebagai berikut:

No.	Kawasan	Jenis Pungutan					Nominal
		Karcis Masuk PAP			TM Pendidikan	TM Penelitian	
		Domestik	Mancanegara	Sarana yang Dibawa			
1	TNP Laut Sawu	20.000	2.275.000	2.716.250	-	200.000	5.211.250
2	TWP Gili Matra	5.720.000	2.057.200.000	5.000	520.000	3.100.000	2.066.545.000
3	TWP Kapoposang	590.000	500.000	13.156.250	-	-	14.246.250
4	TWP Laut Banda	20.000	15.300.000	4.093.750	-	200.000	19.613.750
5	TWP Kep. Padaido	30.000	300.000	55.000	-	-	385.000
6	SAP Raja Ampat	212.500	9.425.000	22.428.750	10.000	100.000	32.176.250
7	SAP Waigeo	1.375.000	137.280.000	92.751.250	-	-	231.406.250
8	SAP Aru Tenggara	-	-	-	-	100.000	100.000
TOTAL		7.967.500	2.222.280.000	135.206.250	530.000	3.700.000	2.369.683.750
		Rp2.365.453.750					
		99,82%					
Prosentase Besaran PNB Per Jenis Pungutan		0,34%	93,78%	5,71%	0,02%	0,16%	

2. Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (Kode akun 425122). Detail pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin sebagai berikut:

No.	Nomor Risalah Lelang	Uraian BMN yang dilelang	NTPN	NTB	Tanggal	Nominal
1	108/69/2023 27 Maret 2023	1 Paket LCD	C5E6248VV5CFRBMU	230404815352	04 April 2023	2.123.999
		1 PAKET AC Split				510.000
		1 Unit Kamera Udara (Drone)				1.888.888
		1 Paket Handy Talky				3.500.000
		1 Unit Skuter Selam				2.123.999
2	109/69/2023 27 Maret 2023	1 Paket sisa puing dan Mesin Kapal Pemantau TNP Laut Sawu	1B0A948VV5A9PKD8	230330926576	30 March 2023	17.999.999
3	110/69/2023 27 Maret 2023	Stationery Generating Set	B2FF58N3EA8CSKRP	230403651871	03 April 2023	24.999.999
4	111/69/2023 27 Maret 2023	1 Paket Instalasi Air Bersih	52D173CIFANS7HIP	230329661495	29 March 2023	8.888.000
TOTAL						62.034.884

3. Pendapatan Lain-Lain - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (Kode Akun 425912) yang berasal dari Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2022 yang terjadi akibat kesalahan dobel pencatatan kwitansi hingga terbit SP2D atas kwitansi tersebut senilai total Rp.1.300.000. Transaksi tersebut disetor ke Kas Negara pada tanggal 9 Februari 2023 dengan rincian:

- Pengembalian kelebihan belanja barang tahun anggaran yang lalu berupa pembayaran atas belanja perjalanan dinas dan belanja bahan dalam rangka pendataan morfometrik dan TKG Ikan KKPN SAP Aru Tenggara tanggal 15 Agustus 2022, nomor kwitansi 2928 dengan NTPN 92C1F61QUQBF1GIU, NTB 000000678404 tanggal 9 Februari 2023 senilai Rp.650.000,-;
- Pengembalian kelebihan belanja barang tahun anggaran yang lalu berupa pembayaran atas belanja perjalanan dinas dan belanja bahan sampel ikan dalam rangka pendataan

morfometrik dan TKG ikan pada kantor BKKPN Kupang wilker Manggarai tanggal 9 Desember 2022, kwitansi nomor 4298 dengan NTPN F59E161QUQBF1H5M, NTB 000000723804 senilai Rp.650.000,-.

Realisasi Belanja
Negara. Rp
24,731,307,929

B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2023 adalah sebesar Rp 24,731,307,929 atau 95,90 % dari anggaran belanja sebesar Rp 25,788,288,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	7.177.738.000	7.084.672.486	98,70%
Belanja Barang	15.598.450.000	14.639.396.144	93,85%
Belanja Modal	3.012.100.000	3.009.674.160	99,92%
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Total Belanja Kotor	25.788.288.000	24.733.742.790	95,91%
Pengembalian		2.434.861	0,00
Jumlah	25.788.288.000	24.731.307.929	95,90%

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami **penurunan sebesar (8,94)** persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2022. Penurunan realisasi belanja diantaranya sebagai berikut:

- Pada jenis belanja pegawai terdapat pengurangan PNS dikarenakan mutasi sebanyak 3 orang, mengundurkan diri 2 orang, serta penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sejumlah 1 orang. Hal tersebut berpengaruh terhadap serapan belanja pegawai. Faktor lain berupa perubahan besaran serapan belanja tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan fungsional atas penambahan Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK) pada satker BKKPN Kupang tahun 2023;
- Penurunan realisasi Belanja Barang diantaranya diakibatkan dari penurunan anggaran belanja barang tahun 2023, yang

lebih rendah dibanding tahun 2022 dan adanya pagu blokir non AA pada Rincian Output Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan Secara Berkelanjutan;

- c. Terdapat penurunan Belanja Modal pada 2023, diakibatkan adanya pengurangan Pagu (Blokir Pagu Anggaran belanja Modal) sehingga besaran anggaran belanja modal tahun 2023 lebih rendah dibanding TA 2022.

Perhitungan Realisasi diluar Anggaran Blokir, Anggaran 2023 senilai 25,088,288,000, realisasi TA 2023 senilai 24,731,307,929 atau sebesar prosentase 98,58% .

Rincian Realisasi berdasarkan Jenis Belanja:

- Realisasi Belanja Pegawai 5,004,553,211 dari Pagu belanja Pegawai 8,111,936,000 atau sebesar 61,69%;
- Realisasi Belanja Barang 9,311,876,886 dari Pagu Belanja Barang 15,878,450,000 atau sebesar 58,64% (67,69% dari pagu diluar blokir);
- Realisasi Belanja Modal 1,940,121,171 dari Pagu Belanja Modal 3,765,488,000 atau sebesar 40,67% (99,56% dari pagu diluar blokir).

Pengembalian Belanja sampai dengan 31 Desember 2023 berupa Belanja Pegawai dan Belanja Barang senilai 2,434,861 dengan detail sebagai berikut:

Akun	Uraian	Nominal	Tanggal	Bukti
511119 - Belanja Pembulatan Gaji PNS	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Bulan April 2023 s.d Bulan Mei 2023 untuk 12 Pegawai	461	14 August 2023	SP2D Nomor 230391303008557 SPM 177
523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Dobel pencatatan kwitansi "Belanja BBM Pertalite sebanyak 29,01 L dan Pertamina sebanyak 51 L tanggal 16 Januari, 12 dan 15 Februari 2023 dalam rangka pemeliharaan Rigid Inflatable Boat Kantor BKKPN Kupang Bulan Januari dan Februari 2023 nomor kwitansi 418	1.024.100	31 July 2023	NTPN 4E4728JM9RRG9B8F NTP 000000166162 tanggal 31 Juli 2023
524113 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Dobel pencatatan kwitansi "Belanja perjalanan dinas Dalam Kota dalam rangka Pendataan Morfometrik dan TKG Ikan Kawasan Konservasi Laut Sawu Region Timor 27 Juni 2023" nomor kwitansi 1870	300.000	31 July 2023	NTPN 20234520AHU0R7H NTP 000000216479 31 Juli 2023
511151 - Belanja Tunjangan Umum PNS	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Bulan September s.d Oktober 2023 untuk 3 Pegawai (Pembayaran Tunjangan Fungsional Perencanaan)	1.110.300	27 November 2023	SPM 002987/499352/2023 230391303013405
		2.434.861		

Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	7.083.561.725	7.142.265.464	(0,82)
Belanja Barang	14.638.072.044	15.536.093.954	(5,78)
Belanja Modal	3.009.674.160	4.480.378.320	(32,83)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
Jumlah	24.731.307.929	27.158.737.738	(8,94)

Belanja Pegawai Rp 7,177,738,000 **B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp 7,177,738,000** dan **Rp 7,083,561,725**. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2023 mengalami **penurunan (0,80)** persen dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain adanya mutasi PNS ke unit kerja lain. Pada 2023 terdapat penambahan belanja pegawai PPPK, untuk mengakomodir pembayaran gaji PPPK yang masuk pada BKKPN Kupang per bulan Agustus 2023.

Perbandingan Belanja Pegawai
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.659.861.889	6.896.939.464	-3,44%
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	47.073.836	-	10000,00%
Belanja Honorarium	-	-	0,00%
Belanja Lembur	376.626.000	245.326.000	53,52%
Jumlah Belanja Kotor	7.083.561.725	7.142.265.464	-0,82%
Pengembalian Belanja Pegawai	1.110.761	2.370.571	-53%
Jumlah Belanja	7.082.450.964	7.139.894.893	-0,80%

Terdapat pengembalian belanja pegawai yang berasal dari:

1. Pengembalian Belanja Belanja Pembulatan Gaji PNS senilai Rp.461 atas SPM Nomor 177 tanggal 9 Agustus 2023 "Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Bulan April 2023 s.d Bulan Mei 2023 untuk 12 Pegawai" dengan nomor SP2D 230391303008557 tanggal 14 Agustus 2023.
2. Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS senilai Rp. 1,110,300 atas SPM nomor 00298T/499352/2023 dan SP2D 230391303013405 tanggal 27 November 2023 dengan uraian SPM "Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Bulan September s.d Oktober 2023 untuk 3 Pegawai". Pengembalian terbentuk akibat pembayaran tunjangan fungsional perencana bulan September & Oktober, Dimana sebelum tunjangan fungsional tersebut dibayarkan, pegawai mendapatkan tunjangan umum yang melekat di pembayaran gaji September dan Oktober 2023. Sehingga saat kekurangan gaji tunjangan fungsional dibayarkan hanya selisih dari tunjangan umum yang dibayarkan. Selisih dari tunjangan umum dikembalikan ke kas negara dalam bentuk potongan SPM.

Belanja Barang
Rp14,638,072,044

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp 14,638,072,044** dan **Rp 15,536,093,954**. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami **penurunan sebesar (5,79) %** dari Realisasi Belanja Barang TA

2022. Perubahan naik turun disebabkan antara lain:

- a. Besaran pagu belanja Barang TA 2023 lebih rendah dibanding dengan pagu belanja barang TA 2022. Pagu TA 2023 sebesar 15,598,450,000 dan tahun 2022 sebesar 16,089,033,000.
- b. Penurunan signifikan pada realisasi Belanja Jasa, Dimana pada tahun 2022 terdapat banyak kegiatan bimbingan teknis dengan pelaksana pekerjaan pihak ketiga penyedia jasa yang dibebankan di akun belanja Jasa. Dimana pada tahun 2023 lebih rendah realisasinya dibanding tahun 2022.
- c. Kenaikan signifikan terdapat pada jenis belanja perjalanan dinas luar negeri Dimana pada tahun 2023 terdapat 1 perjalanan dinas luar negeri terealisasi di akun belanja tersebut. Pada tahun 2022 tidak terdapat pelaksanaan dan tidak dianggarkan belanja perjalanan dinas luar negeri.

Perbandingan Belanja Barang
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Barang Operasional	2.334.877.987	2.614.549.692	(10,70)
Belanja Barang Non Operasional	2.290.647.126	2.332.147.726	(1,78)
Belanja Barang Persediaan	162.137.978	182.011.353	(10,92)
Belanja Jasa	3.465.271.594	4.371.528.314	(20,73)
Belanja Pemeliharaan	1.533.989.758	1.215.735.056	26,18
Belanja Perjalanan Dinas dalam Negeri	4.610.683.692	4.620.517.950	(0,21)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	55.712.855	-	100,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat	184.751.054	199.603.863	(7,44)
Jumlah Belanja Kotor	14.638.072.044	15.536.093.954	(5,78)
Pengembalian Belanja	1.324.100	3.011.000	(56,02)
Jumlah Belanja	14.639.396.144	15.539.104.954	(5,79)

Pada 2023 terdapat pengembalian belanja barang dengan detail berikut:

1. Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin atas dobel pencatatan kwitansi nomor 418 senilai 1.024.100 NTPN 4E4728JM9RRG9B8F NTP 000000166162 tanggal 31 Juli 2023;
2. Pengembalian Belanja perjalanan dinas dalam kota atas dobel pencatatan kwitansi nomor 1870 senilai 300.000 NTPN 20234520AHHU0R7H NTP 000000216479.

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp 3,009,674,160** dan **Rp 4,480,378,320**. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami penurunan sebesar **(32,83)** persen dibandingkan TA. Nilai penurunan dikarenakan pagu belanja modal TA 2023 lebih rendah dibanding pagu belanja modal TA 2022, yakni senilai 3,012,100,000 dan 4,692,632,000.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.009.674.160	3.947.545.320	(23,76)
Belanja Gedung dan Bangunan	0	365.300.000	(100,00)
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	0	167.533.000	(100,00)
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	3.009.674.160	4.480.378.320	(32,83)
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	3.009.674.160	4.480.378.320	(32,83)

Rekapitulasi penambahan Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2023 berasal dari belanja modal Peralatan dan Mesin dengan rincian pengadaan sebagai berikut:

No.	Uraian Pengadaan	Nomor SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Mekanisme	Nominal
1	Pekerjaan Pengadaan Peralatan Survei Kawasan Konservasi Perairan	000147/499352/2023	230391701000922	10 July 2023	LS Kontraktual	336.570.759
		000597/499352/2023	230391303002640	31 March 2023	LS Kontraktual	785.331.771
2	Pengadaan Alat Pendukung Pemantauan Kawasan Konservasi Laut Sawu	000557/499352/2023	230391303002280	21 March 2023	LS Kontraktual	44.606.000
3	Pengadaan Alat Pengangkut Survei	000677/499352/2023	230391301006746	05 April 2023	LS Kontraktual	39.417.000
4	Pengadaan Alat Pendukung Pemantauan Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido	000757/499352/2023	230391302002987	11 April 2023	LS Kontraktual	32.493.243
5	Pengadaan Alat Pendukung Pemantauan Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang	000847/499352/2023	230391303003352	14 April 2023	LS Kontraktual	44.606.000
6	Pengadaan Alat Pendukung Pemantauan Kawasan Konservasi Laut Banda	000857/499352/2023	230391303003366	14 April 2023	LS Kontraktual	22.303.000
7	Pengadaan Perlengkapan Layanan Konservasi Tnp Laut Sawu	000907/499352/2023	230391303004196	10 May 2023	LS Kontraktual	193.144.898
8	Pengadaan Kompresor Tabung Selam	001317/499352/2023	230391701000794	22 June 2023	GUP Tunai	119.269.500
9	Pengadaan Sarana Sosialisasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	001377/499352/2023	230391303006389	26 June 2023	PTUP Tunai	198.579.000
10	Pengadaan Water Quality Checker	001387/499352/2023	230391701000837	26 June 2023	PTUP Tunai	123.800.000
11	Belanja Peralatan Input Data Pemanfaatan Kawasan Konservasi berupa 1 unit laptop pada Kantor BKKPN Kupang tanggal 25 Agustus 2023	001957/499352/2023	230391303009212	29 August 2023	GUP KKP	16.765.100
12	Pembayaran sekaligus Belanja Modal Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Fungsional Survey dan Pelayanan Pemanfaatan KK dan KKPRL	003087/499352/2023	230391303013841	05 December 2023	LS Kontraktual	500.000.000
13	Pembayaran sekaligus Belanja Modal Berupa Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Fungsional Survei dan Pelayanan Pemanfaatan KK dan KKPRL	003577/499352/2023	230391303015701	19 December 2023	LS Kontraktual	330.500.000
14	Belanja Saramonic Blink 500 B2 Wireless Clip On Mic - New Version sebanyak 3 pack pada kantor BKKPN Kupang tanggal 15 Desember 2023	003617/499352/2023	230391303015741	19 December 2023	GUP KKP	6.563.100
15	Belanja Modal berupa Pengadaan Sarana Pelayanan Pemanfaatan Kawasan Konservasi	003777/499352/2023	230391701003286	20 December 2023	PTUP Nihil	199.765.590
16	Belanja Alat Pendukung Pelayanan Pemanfaatan Kawasan Konservasi berupa Bracket TV pada Kantor BKKPN Kupang pada tanggal 15 Desember 2023	003797/499352/2023	230391701003684	27 December 2023	GUP Nihil	2.359.199
17	Belanja Alat Pendukung Pelayanan Pemanfaatan Kawasan Konservasi berupa 3 unit AC pada Kantor BKKPN Kupang pada tanggal 15 Desember 2023					13.600.000
TOTAL						3.009.674.160

Belanja Modal
Tanah Rp0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Realisasi tersebut pada TA 2022 tidak mengalami **kenaikan/penurunan sebesar 0,00** persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya anggaran belanja modal tanah selama TA 2023 dan TA 2022

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	0	0	0,00

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp3,009,674,160

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar **Rp 3,009,674,160** tidak mengalami penurunan sebesar **(18,56)** persen bila dibandingkan dengan TA 2022 sebesar **Rp 3,110,198,802**. Realisasi Belanja Modal peralatan dan mesin pada TA 2023 mengalami penurunan dibandingkan pada TA 2022 sebesar **(23,76)** persen dikarenakan terdapat perbedaan nilai besaran anggaran belanja modal peralatan dan mesin. Nilai belanja modal peralatan dan mesin TA 2023 lebih rendah dibanding TA 2022, yakni senilai 3,012,100,000 dan 3,960,886,000.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	3.009.674.160	3.947.545.320	(23,76)
Jumlah Belanja Kotor	3.009.674.160	3.947.545.320	(23,76)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	3.009.674.160	3.947.545.320	(23,76)

Rekapitulasi penambahan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

No.	Uraian Pengadaan	Nomor SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Mekanisme	Nominal
1	Pekerjaan Pengadaan Peralatan Survei Kawasan Konservasi Perairan	000147/499352/2023	230391701000922	10 July 2023	LS Kontraktual	336.570.759
		000597/499352/2023	230391303002640	31 March 2023	LS Kontraktual	785.331.771
2	Pengadaan Alat Pendukung Pemantauan Kawasan Konservasi Laut Sawu	000557/499352/2023	230391303002280	21 March 2023	LS Kontraktual	44.606.000
3	Pengadaan Alat Pengangkut Survei	000677/499352/2023	230391301006746	05 April 2023	LS Kontraktual	39.417.000
4	Pengadaan Alat Pendukung Pemantauan Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido	000757/499352/2023	230391302002987	11 April 2023	LS Kontraktual	32.493.243
5	Pengadaan Alat Pendukung Pemantauan Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang	000847/499352/2023	230391303003352	14 April 2023	LS Kontraktual	44.606.000
6	Pengadaan Alat Pendukung Pemantauan Kawasan Konservasi Laut Banda	000857/499352/2023	230391303003366	14 April 2023	LS Kontraktual	22.303.000
7	Pengadaan Perlengkapan Layanan Konservasi Tnp Laut Sawu	000907/499352/2023	230391303004196	10 May 2023	LS Kontraktual	193.144.898
8	Pengadaan Kompresor Tabung Selam	001317/499352/2023	230391701000794	22 June 2023	GUP Tunai	119.269.500
9	Pengadaan Sarana Sosialisasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	001377/499352/2023	230391303006389	26 June 2023	PTUP Tunai	198.579.000
10	Pengadaan Water Quality Checker	001387/499352/2023	230391701000837	26 June 2023	PTUP Tunai	123.800.000
11	Belanja Peralatan Input Data Pemanfaatan Kawasan Konservasi berupa 1 unit laptop pada Kantor BKKPN Kupang tanggal 25 Agustus 2023	001957/499352/2023	230391303009212	29 August 2023	GUP KKP	16.765.100
12	Pembayaran sekaligus Belanja Modal Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Fungsional Survey dan Pelayanan Pemanfaatan KK dan KKPR	003087/499352/2023	230391303013841	05 December 2023	LS Kontraktual	500.000.000
13	Pembayaran sekaligus Belanja Modal Berupa Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Fungsional Survei dan Pelayanan Pemanfaatan KK dan KKPR	003577/499352/2023	230391303015701	19 December 2023	LS Kontraktual	330.500.000
14	Belanja Saramonic Blink 500 B2 Wireless Clip On Mic - New Version sebanyak 3 pack pada kantor BKKPN Kupang tanggal 15 Desember 2023	003617/499352/2023	230391303015741	19 December 2023	GUP KKP	6.563.100
15	Belanja Modal berupa Pengadaan Sarana Pelayanan Pemanfaatan Kawasan Konservasi	003777/499352/2023	230391701003286	20 December 2023	PTUP Nihil	199.765.590
16	Belanja Alat Pendukung Pelayanan Pemanfaatan Kawasan Konservasi berupa Bracket TV pada Kantor BKKPN Kupang pada tanggal 15 Desember 2023	003797/499352/2023	230391701003684	27 December 2023	GUP Nihil	2.359.199
17	Belanja Alat Pendukung Pelayanan Pemanfaatan Kawasan Konservasi berupa 3 unit AC pada Kantor BKKPN Kupang pada tanggal 15 Desember 2023					13.600.000
TOTAL						3.009.674.160

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp355,300,000**. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 mengalami **penurunan sebesar 100,00 %** persen dibandingkan Realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya anggaran belanja modal gedung dan bangunan TA 2023.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2023 dan 2022*

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	%
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0	355.300.000	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	0	355.300.000	(100,00)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	355.300.000	(100,00)

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp0*

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp167,533,000**. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 **mengalami penurunan sebesar 100,00 %** persen dibandingkan Realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan selama TA 2023 lebih kecil daripada TA 2022

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan
Jaringan

TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	%
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	-	167.533.000	(100,00)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	-		0,00
Jumlah Belanja Kotor	-	167.533.000	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00
Jumlah Belanja	-	167.533.000	(100,00)

*Belanja Bantuan
Sosial Rp0*

B. 6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Realisasi Belanja

Bantuan Sosial TA 2023 **tidak mengalami penurunan/kenaikan sebesar 00,00 %** persen dibandingkan Realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya anggaran belanja Bantuan Sosial selama TA 2023 dan 2022.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp803,780

C.1 Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp803,780** dan **Rp4,108,500**. Aset Lancar merupakan asset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tertanggal pelaporan.

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp 0

C. 1. 1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan / Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara pertanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar **Rp 0** dan **Rp 0** dengan rincian sebagai berikut : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
TA 2023 dan 2022*

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang Tunai	0	0
Bank BNI - BPG 039 BKKPN KUPANG 9891344993521000	0	0
Jumlah	0	0

Rekening Bendahara Pengeluaran merupakan Rekening Virtual Pengeluaran dengan persetujuan dari KPPN Kupang Nomor S-2769/WPB.12/KP.03/2020/039 tanggal 21 Oktober 2020 dengan nomor rekening virtual

9891344993521000. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sisa uang persediaan telah disetorkan ke kas Negara tanggal 28 Desember 2023.

*Kas di bendahara
Penerimaan Rp0*

C. 1. 2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang Tunai	0	0
Rekening Penerimaan - Tidak Terdapat rekening penerimaan	0	0
Jumlah	0	0

Pada satker BKKPN Kupang tidak terdapat rekening penerimaan untuk menampung cash PNBPN atau pendapatan lainnya. Hal ini dikarenakan sistem pembayaran PNBPN dilakukan secara nirtunai/ *cashless* dari pengguna layanan langsung membayar billing yang telah diterbitkan operator/ Bendahara Penerimaan.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0*

C. 1. 3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan Kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara Kas yaitu Investasi Jangka Pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas Lainnya di bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan
Pajak Rp0

C. 1. 4 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0** dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Piutang PNB	0	0
Piutang Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR) Rp0

C. 1. 5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Nama	Tahun 2023	Tahun 2022
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
Jumlah		0	0

C.1.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Bagian Lancar tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan (TPA) yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut :

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
Jumlah		0	0

C.1.7 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0** yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang, masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Pendek
(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0%	-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0%	-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak tertagih	-	0%	-

Beban Dibayar Dimuka
Rp.0

C.1.8 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Beban Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar Dimuka Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Dibayar Dimuka TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2023	Tahun 2022
Pembayaran Internet	0	0
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	0	0
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	0	0
Jumlah	0	0

Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima Rp.0

C.1.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan Hak Pemerintah atas layanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**, dengan rincian sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus
Diterima TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan	0	0
Pendapatan	0	0
Jumlah	0	0

Persediaan Rp.
803,780

C.1.10 Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp 803,780** dan **Rp 4.108.500**.

Rincian Persedian TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2023	Tahun 2022
Barang Konsumsi	803.780	4.108.500
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Persediaan Lainnya	0	0
Jumlah	803.780	4.108.500

Semua Jenis Persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Barang konsumsi berupa:

1. Alat tulis senilai 119,750
2. Penjepit Kertas 64,380
3. Alat Tulis Kantor Lainnya 349,650
4. Meterai 270,000

Aset Tetap Rp
33,765,559,799

C. 2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp 33,765,559,799** dan **Rp 33.905.283.348**. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah
Rp.17.419.986.688

C. 2. 1 Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp 17.419.986.688** dan **Rp 17.419.986.688**.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut :

Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	17.419.986.688
Mutasi tambah :	
Pembelian	-
Mutasi Kurang :	
Revaluasi Aset	-
Penghapusan	-
Saldo per 30 September 2023	17.419.986.688
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2023	-
Nilai Buku per 30 September 2023	17.419.986.688

Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Tanah TA 2023

(dalam rupiah)

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	30.192 M2'	Jl. Yos Sudarso Bolok-Kec. Alak Kupang, Nusa Tenggara Timur - Kantor Utama BKKPN Kupang	16.907.520.000
2	720 M2	Jl. Ampenan Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat - Kantor TWP Gili Matra	512.466.688
Jumlah			17.419.986.688

Detail Rincian Tanah:

1. Tanah seluas 30.192 m2 yang terletak di Jl. Yos Sudarso Jurusan Bolok Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal pelaporan dikuasai/digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari dan sertifikat Hak Pakai atas Nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
2. Tanah bertempat di Jl. Bangsal Baru, Desa Pemenang Barat, Kec. Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat dengan luas tanah 720 M2 yang merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2022. Aset tanah untuk saat ini digunakan sebagai Kantor BKKPN Kupang wilayah kerja Taman Wisata Perairan Gili Matra.

Peralatan dan
Mesin Rp.
24,367,701,739

C. 2. 2 Peralatan dan Mesin

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp 24,367,701,739** dan **Rp24.258.762.506**. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	24.258.762.506
Mutasi tambah :	
Pembelian	3.009.674.160
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	- 37.993.080
Mutasi Kurang:	
Usulan penghapusan BMN	- 2.862.741.847
Saldo per 31 Desember 2023	24.367.701.739

Penambahan aset Peralatan dan Mesin di 2023 senilai Rp. 1,940,121,171 berasal dari pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Berupa Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Peralatan Survei Kawasan Konservasi Perairan. Nomor Kontrak SP. 56/BKKPN.PPK/PL.430/I/2023 tanggal 25/01/2023 senilai Rp. 1.121.902.530. Pengadaan tersebut dibayar melalui 2 kali pembayaran,
 - Pembayaran 1, SPM 00014T/499352/2023 nomor & tanggal SP2D 230391303000451 7 Februari 2023 dengan uraian “ Pembayaran Belanja Modal Berupa Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Peralatan Survei Kawasan Konservasi Perairan sesuai BAP No. BAP.64/BKKPN.PPK /PL.450/I/2023 tgl 26-01-2023, Jaminan Uang Muka dari PT.Asuransi Umum Videi No. 16.92.02.0007.01.23” senilai **Rp. 336.570.759.**
 - Pembayaran 2 (Pelunasan), SPM 00059T/499352/2023 nomor & tanggal SP2D 230391303002640 31 Maret 2023 dengan uraian “ Pembayaran Sekaligus Belanja Modal Pekerjaan Pengadaan Peralatan Survei Kawasan Konservasi Perairan sesuai BAST No. BAST.369/BKKPN.PPK /PL.450/III/2023 tgl 24-03-2023, BAP No. BAP.377/BKKPN.PPK/PL.450/ III/2023 tgl 27-03-2023” senilai **Rp. 785.331.771**

Di pelaksanaan pembayaran ke 2 atas Pengadaan Peralatan Survei Kawasan Konservasi Perairan terdapat nilai barang di bawah Kapitalisasi senilai Rp.37.993.080 yang membentuk Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin pada pencatatan akrual sistem SAKTI. Rincian nilai belanja modal dibawah nilai kapitalisasi sebagai berikut:

No.	Uraian barang	Kuantitas	Harga Satuan	Harga Total
1	Tas Kamera	4	999.000	3.996.000
2	Universal Clamp, Clamping Range 6 To 12 mm	2	555.000	1.110.000
3	Mesh Bag	8	888.000	7.104.000
4	Belt/Apron Feeder	8	198.690	1.589.520
5	Weight	31	111.000	3.441.000
6	Dive Boots	24	864.690	20.752.560
	TOTAL			37.993.080

2. Belanja Modal Alsin Pengadaan Alat Pendukung Pemantauan Kawasan Konservasi Laut Sawu. Nomor kontrak SP.279/BKKPN.PPK/PL.430/III/2023 tanggal 2 Maret 2023 dengan rincian barang berupa Sepeda Motor sebanyak 2 unit. Pengadaan tersebut dibayar secara LS Kontraktual dengan SPM Nomor 00055T/499352/2023 dengan Nomor & tanggal SP2D 230391303002280 21 Maret 2023.
3. Belanja Modal Alsin Pengadaan Alat Pengangkut Survei nomor kontrak SP.347/BKKPN.PPK/PL.430/III/2023 tanggal 17 Maret 2023. Pengadaan tersebut berupa 1 unit Motor Roda 3 yang ditempatkan di Banda Neira – TWP Laut Banda. Pembayaran dilakukan secara LS Kontraktual dengan nomor SPM 00067T/499352/2023 dengan nomor & tanggal SP2D 230391301006746 tanggal 5 April 2023 senilai **Rp39.417.000**.
4. Pengadaan Alat Pendukung Pemantauan Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido dengan nomor kontrak SPK.391/BKKPN.PPK/PL.430/III/2023 tanggal 29 Maret 2023. Rincian barang atas

pengadaan tersebut berupa 1 unit sepeda motor. Pembayaran dilakukan secara LS Kontraktual nomor SPM 00075T/499352/2023 dengan nomor & tanggal SP2D 230391302002987 tanggal 11 April 2023 senilai **Rp. 32.493.243.**

5. Pengadaan Alat Pendukung Pemantauan Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang dengan nomor kontrak SP.346/BKKPN.PPK/PL.430/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 senilai **Rp.44.606.000.**
6. Pengadaan Alat Pendukung Pemantauan Kawasan Konservasi Laut Banda dengan nomor kontrak SP.345/BKKPN.PPK/PL.430/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 senilai **Rp.22.303.000.**
7. Pengadaan Perlengkapan Layanan Konservasi Tnp Laut Sawu dengan nomor kontrak SPK.406/BKKPN.PPK/PL.430/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 senilai **Rp.193.144.898.**
8. Pekerjaan Pengadaan Kompresor Tabung Selam sesuai Surat Perintah Kerja nomor SPK.530/BKKPN.PPK/PL.430/V/2023 tanggal 29 Mei 2023, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor BAST.571/BKKPN.PPK/PL.450/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 dan Berita Acara Pembayaran Langsung Nomor BAP.576/BKKPN.PPK/PL.450/VI/2023 Tanggal 15 Juni 2023 senilai **Rp.119.269.500** yang dibayar menggunakan Ganti Uang Persediaan RM. Pengadaan tersebut berupa 1 unit Kompresor Tabung Selam yang berada di Kabupaten Sumba Timur – wilayah kerja TNP Laut Sawu.
9. Pekerjaan Pengadaan Sarana Sosialisasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan sesuai Surat Perintah Kerja nomor SPK.547/BKKPN.PPK/PL.430/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor

BAST.606/BKKPN.PPK/PL.450/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 dan Berita Acara Pembayaran Langsung Nomor BAP.612/BKKPN.PPK /PL.450/VI/2023 Tanggal 23 Juni 2023 senilai **Rp.198.579.000** yang dibayarkan melalui Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (PTUP). Pengadaan tersebut berupa 6 unit *webcam conference*, 1 unit dispenser, 2 unit Projector, 2 unit tablet smartphone, 1 unit CCTV, 1 Unit *UPS*, 1 unit Screen Proyektor, 1 unit smart TV 50 inchi, 4 unit AC 1 PK, 1 Unit AC 2 PK, 2 unit printer, 3 unit Handphone untuk call center Pelayanan.

10. Pekerjaan Pengadaan Water Quality Checker sesuai Surat Perintah Kerja nomor SPK.550/BKKPN.PPK/PL.430/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor BAST.608/BKKPN.PPK/PL.450/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 dan Berita Acara Pembayaran Langsung Nomor BAP.614/BKKPN.PPK/ PL.450/VI/2023 Tanggal 23 Juni 2023 senilai **Rp.123.800.000** yang dibayarkan melalui Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (PTUP).
11. Belanja Peralatan Input Data Pemanfaatan Kawasan Konservasi berupa 1 unit laptop pada Kantor BKKPN Kupang tanggal 25 Agustus 2023 senilai **Rp 16.765.100** yang dibayarkan melalui Ganti Uang Persediaan (GUP) KKP.
12. Belanja Modal Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Fungsional Survey dan Pelayanan Pemanfaatan KK dan KKPRL berupa Mobil Toyota Inova Zenix senilai **Rp. 500.000.000** tanggal 5 Desember 2023 yang dibayarkan melalui LS Kontraktual.
13. Belanja Modal Berupa Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Fungsional Survei dan Pelayanan Pemanfaatan KK dan KKPRL berupa mobil Toyota

Rush GR senilai **Rp. 330.500.000** tanggal 19 Desember 2023 yang dibayarkan secara LS Kontraktual.

14. Belanja Saramonic Blink 500 B2 Wireless Clip On Mic - New Version sebanyak 3 pack pada kantor BKKPN Kupang tanggal 15 Desember 2023 senilai **Rp.6.563.100** yang dibayarkan melalui mekanisme GUP KKP.
15. Belanja Modal berupa Pengadaan Sarana Pelayanan Pemanfaatan Kawasan Konservasi berupa peralatan penunjang pelayanan berupa meja dan TV senilai **Rp. 199.765.590** yang dibayarkan mekanisme PTUP Nihil tanggal 20 Desember 2023.
16. Belanja Alat Pendukung Pelayanan Pemanfaatan Kawasan Konservasi berupa Bracket TV pada Kantor BKKPN Kupang pada tanggal 15 Desember 2023 senilai 2.359.199 dan Belanja Alat Pendukung Pelayanan Pemanfaatan Kawasan Konservasi berupa 3 unit AC pada Kantor BKKPN Kupang pada tanggal 15 Desember 2023 senilai 13.600.000 yang dibayarkan melalui mekanisme GUP Nihil tanggal 27 Desember 2023.

No.	Uraian Pengadaan	Nomor SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Mekanisme	Nominal
1	Pekerjaan Pengadaan Peralatan Survei Kawasan Konservasi Perairan	000147/499352/2023	230391701000922	10 July 2023	LS Kontraktual	336.570.759
		000597/499352/2023	230391303002640	31 March 2023	LS Kontraktual	785.331.771
2	Pengadaan Alat Pendukung Pemantauan Kawasan Konservasi Laut Sawu	000557/499352/2023	230391303002280	21 March 2023	LS Kontraktual	44.606.000
3	Pengadaan Alat Pengangkut Survei	000677/499352/2023	230391301006746	05 April 2023	LS Kontraktual	39.417.000
4	Pengadaan Alat Pendukung Pemantauan Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido	000757/499352/2023	230391302002987	11 April 2023	LS Kontraktual	32.493.243
5	Pengadaan Alat Pendukung Pemantauan Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang	000847/499352/2023	230391303003352	14 April 2023	LS Kontraktual	44.606.000
6	Pengadaan Alat Pendukung Pemantauan Kawasan Konservasi Laut Banda	000857/499352/2023	230391303003366	14 April 2023	LS Kontraktual	22.303.000
7	Pengadaan Perlengkapan Layanan Konservasi Tnp Laut Sawu	000907/499352/2023	230391303004196	10 May 2023	LS Kontraktual	193.144.898
8	Pengadaan Kompresor Tabung Selam	001317/499352/2023	230391701000794	22 June 2023	GUP Tunai	119.269.500
9	Pengadaan Sarana Sosialisasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	001377/499352/2023	230391303006389	26 June 2023	PTUP Tunai	198.579.000
10	Pengadaan Water Quality Checker	001387/499352/2023	230391701000837	26 June 2023	PTUP Tunai	123.800.000
11	Belanja Peralatan Input Data Pemanfaatan Kawasan Konservasi berupa 1 unit laptop pada Kantor BKKPN Kupang tanggal 25 Agustus 2023	001957/499352/2023	230391303009212	29 August 2023	GUP KKP	16.765.100
12	Pembayaran sekaligus Belanja Modal Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Fungsional Survey dan Pelayanan Pemanfaatan KK dan KKPRL	003087/499352/2023	230391303013841	05 December 2023	LS Kontraktual	500.000.000
13	Pembayaran sekaligus Belanja Modal Berupa Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Fungsional Survei dan Pelayanan Pemanfaatan KK dan KKPRL	003577/499352/2023	230391303015701	19 December 2023	LS Kontraktual	330.500.000
14	Belanja Saramonic Blink 500 B2 Wireless Clip On Mic - New Version sebanyak 3 pack pada kantor BKKPN Kupang tanggal 15 Desember 2023	003617/499352/2023	230391303015741	19 December 2023	GUP KKP	6.563.100
15	Belanja Modal berupa Pengadaan Sarana Pelayanan Pemanfaatan Kawasan Konservasi	003777/499352/2023	230391701003286	20 December 2023	PTUP Nihil	199.765.590
16	Belanja Alat Pendukung Pelayanan Pemanfaatan Kawasan Konservasi berupa Bracket TV pada Kantor BKKPN Kupang pada tanggal 15 Desember 2023	003797/499352/2023	230391701003684	27 December 2023	GUP Nihil	2.359.199
17	Belanja Alat Pendukung Pelayanan Pemanfaatan Kawasan Konservasi berupa 3 unit AC pada Kantor BKKPN Kupang pada tanggal 15 Desember 2023					13.600.000
TOTAL						3.009.674.160

Gedung dan
Bangunan
Rp.7,662,704,911

C. 2. 3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp 7,662,704,911** dan **Rp 7.686.573.911**. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2023
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	7.686.573.911
Mutasi tambah :	
Pembangunan Gedung	-
Mutasi Kurang:	-
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	- 23.869.000
Saldo per 31 Desember 2023	7.662.704.911
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	- 905.538.825
Nilai Buku per 31 Desember 2023	6.757.166.086

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp.1,467,765,500

C. 2. 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp 1.467.765.500** dan **Rp 1.467.765.500**.

Rincian Mutasi Jalan, irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	1.467.765.500
Mutasi tambah :	
-	-
Mutasi Kurang	-
Koreksi Pencatatan	
Saldo per 31 Desember 2023	1.467.765.500
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	- 916.298.312
Nilai Buku per 31 Desember 2023	551.467.188

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Tetap Lainnya
RP.1.000.000

C. 2. 5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp 1.000.000** dan **Rp**

1.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	1.000.000
Mutasi tambah :	
-	-
Mutasi Kurang	-
-	
Saldo per 30 September 2023	1.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2023	-
Nilai Buku per 30 September 2023	1.000.000

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp.0*

C. 2. 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Rp.
(17,153,599,039)*

C. 2. 7 Akumulasi Penyusutan Aset

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing – masing adalah sebesar **Rp(17,153,599,039)** dan **Rp(16,928,805,257)**.

Akumulasi Penyusutan Aset merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain bentuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset per 31 Desember 2023 :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	17.419.986.688	-	17.419.986.688
2	Peralatan dan Mesin	24.367.701.739	(15.331.761.902)	9.035.939.837
3	Gedung dan Bangunan	7.662.704.911	(905.538.825)	6.757.166.086
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	1.467.765.500	(916.298.312)	551.467.188
5	Aset Tetap Lainnya	1.000.000	-	1.000.000
Akumulasi Penyusutan		50.919.158.838	(17.153.599.039)	33.765.559.799

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Piutang Jangka Panjang Rp.0

C. 3 Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp.0

C. 3. 1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2022 dan 2022
(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
Jumlah		0	0

Tagihan Penjualan
Angsuran Rp.0

C. 3. 2 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Rincian TPA untuk masing - masing debitor adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang TPA TA 2022 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
Jumlah		0	0

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang Rp.0

C. 3. 3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.

Panjang TA 2023

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0%	-
Tagihan TPA			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-	0%	-

Aset Lainnya Rp
1,167,039,386

C.4 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp 1,167,039,386** dan **Rp 1,251,391,134**.

Aset Tak Berwujud
Rp 0

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp 0** dan **Rp 334.636.900**.

Aset Tak Berwujud merupakan asset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak memiliki wujud fisik. Pada kantor BKKPN Kupang, aset tak berwujud berupa software Komputer Arc Gis.

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	334.636.900
Mutasi kurang :	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	- 334.636.900
Saldo per 31 Desember 2023	-
Amortisasi s.d 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Rincian Aset Tak Berwujud TA 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	-	-
2	-	-
	Jumlah	-

Aset Lain - lain

Rp 12,914,359,552

C.4.2. Aset Lain -lain

Aset Lain - lain per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp12,914,359,552** dan **Rp9,693,111,805**. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut :

Rincian Mutasi Aset lain-lain

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	9.693.111.805
Mutasi tambah :	3.221.247.747
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Peralatan dan Mesin	2.886.610.847
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Aset tak Berwujud (Software)	334.636.900
Mutasi kurang :	-
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
Penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2023	12.914.359.552
Amortisasi s.d 31 Desember 2023	- 11.747.320.166
Nilai Buku per 31 Desember 2023	1.167.039.386

Rincian Aset Lain – lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi

Penyusutan dan

Amortisasi Aset

Lainnya

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Rp(11,747,320,166)

masing-masing adalah sebesar **Rp (11,747,320,166)** dan **Rp (8,776,357,571)**.

Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset

Lainnya TA 2023

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud	-	-	-
	Jumlah		-	-
B	Aset Lain-lain	12.579.722.652	11.412.683.266	1.167.039.386
	Jumlah	-	-	-
	Total	12.579.722.652	11.412.683.266	1.167.039.386

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kewajiban Jangka
Pendek

Rp.24,910,442

C. 5 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atas jatuh tempk dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp 24,910,442** dan **Rp24,858,439**.

Uang Muka dari
KPPN Rp 0

C. 5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp 0** dan **Rp0**, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp24,910,442

C. 5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp 24,910,442** dan

Rp24,858,439, Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	24.910.442
	Total	24.910.442

Belanja Barang yang masih harus dibayar merupakan tagihan belanja pascabayar Listrik, langganan daya dan jasa lainnya, langganan telepon dan air bulan Desember 2023 yang tagihannya dibayarkan di Januari 2024. Detail belanja barang yang masih harus dibayar sebagai berikut:

No.	Uraian Tagihan	Tagihan bulan	Nominal
1	Listrik Kantor Kupang, Banda, Wilker Padaido, dan Wilker Aru	Desember	Rp12.555.800
2	Langganan Daya dan Jasa Lainnya (Internet) 7 KKPN	Desember	Rp11.129.475
3	Langganan Telepon Kantor BKKPN Kupang dan Gili Matra	Desember	Rp390.165
4	Tagihan Langganan Air Wilker Manggarai, Sumba, Gili Matra dan Padaido	Desember	835.002
TOTAL			Rp24.910.442

Pendapatan

Diterima di Muka

Rp0

C. 5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang / jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka

PNBP. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Penapatan Diterima di Muka TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
-	-
-	-
-	-
Jumlah	

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

*Beban yang Masih
Harus Dibayar
Rp0*

C. 5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

*Ekuitas
Rp. 34,908,492,523*

C. 7. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp 34,908,492,523** dan **Rp35,135,924,543**. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan
PNBP
Rp2,369,683,750

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp 2,369,683,750** dan **Rp 1,354,373,750**. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	%
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	2.369.683.750	1.354.373.750	7496,53%
Pendapatan Lain - lain	0	0	0,00%
Jumlah	2.369.683.750	1.354.373.750	7496,53%

Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya berupa pungutan Karcis Masuk Pariwisata Alam Kawasan Konservasi Perairan (Domestik & Mancanegara) beserta Sarana yang dibawa dan Tanda Masuk Penelitian di Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang rentang periode 1 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023. Penerimaan didominasi dari Karcis Masuk Pariwisata Alam Perairan (PAP) senilai 2.365.453.750 atau sebesar 99,82% dari keseluruhan pendapatan jasa kelautan dan perikanan lainnya. Tahun 2023 penerimaan pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan lainnya naik sebesar 7.496,53% dibanding tahun 2022. Kenaikan pendapatan disebabkan antara lain:

- Berakhirnya masa pandemic Covid-19 dan beralih ke masa Endemi, sehingga wisatawan bisa dengan mudah melakukan kunjungan ke Indonesia/ Daerah lain. Hal tersebut berdampak signifikan terhadap kunjungan wisatawan ke Taman Wisata Perairan seperti di Gili Trawangan, Matra, Aer dan di Kawasan KKPN Lain seperti Laut Banda dan Raja Ampat (Wayag, Waigeo). Hal tersebut berdampak pada peningkatan karcis masuk PAP dari Mancanegara yang menyumbang senilai 2.222.280.000 atau

sebesar 93,78% dari total PNBPN Pendapatan Jasa kelautan dan perikanan lainnya.

- b. Penerapan tarif penuh sesuai dengan PP 85 tahun 2021 pasca pandemi per tanggal 21 Desember 2023.
- c. Komitmen organisasi untuk meningkatkan pendapatan dengan menambah Gerai Pelayanan serta penambahan SDM Tenaga Pelayanan yang ditempatkan pada Pos-pos pintu masuk Kawasan Konservasi Perairan Nasional seperti di TWP Gili Matra, TNP Laut Sawu dan SAP Raja Ampat dan Waigeo Sebelah Barat.

Rekapitulasi Capaian Pendapatan Jasa Lainnya sebagai berikut:

No.	Kawasan	Jenis Pungutan					Nominal
		Karcis Masuk PAP			TM Pendidikan	TM Penelitian	
		Domestik	Mancanegara	Sarana yang Dibawa			
1	TNP Laut Sawu	20.000	2.275.000	2.716.250	-	200.000	5.211.250
2	TWP Gili Matra	5.720.000	2.057.200.000	5.000	520.000	3.100.000	2.066.545.000
3	TWP Kapoposang	590.000	500.000	13.156.250	-	-	14.246.250
4	TWP Laut Banda	20.000	15.300.000	4.093.750	-	200.000	19.613.750
5	TWP Kep. Padaido	30.000	300.000	55.000	-	-	385.000
6	SAP Raja Ampat	212.500	9.425.000	22.428.750	10.000	100.000	32.176.250
7	SAP Waigeo	1.375.000	137.280.000	92.751.250	-	-	231.406.250
8	SAP Aru Tenggara	-	-	-	-	100.000	100.000
TOTAL		7.967.500	2.222.280.000	135.206.250	530.000	3.700.000	2.369.683.750
		Rp2.365.453.750					
		99,82%					
Prosentase Besaran PNBPN Per Jenis Pungutan		0,34%	93,78%	5,71%	0,02%	0,16%	

Beban Pegawai D.2 Beban Pegawai

Rp

7,083,561,725

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp 7,083,561,725** dan **Rp 7,142,265,464**. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	%
Beban Gaji	2.782.180.745	2.921.348.121	(4,76)
Beban Tunjangan - Tunjangan	3.924.754.980	3.975.591.343	(1,28)
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	0,00
Beban Lembur	376.626.000	245.326.000	53,52
Jumlah Beban	7.083.561.725	7.142.265.464	(0,82)

Beban

Persediaan Rp

165,442,698

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp 165,442,698** dan **Rp 186,219,753**. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan

TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Persediaan Konsumsi	165.442.698	186.219.753	(11,16)
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0	0,00
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Beban	165.442.698	186.219.753	(11,16)

Beban Barang dan

Jasa

Rp8,128,841,790

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp 8,128,841,790** dan **Rp 9,400,105,401**. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena

adanya penghematan atas beban – beban operasional perkantoran, penurunan beban keperluan perkantoran disebabkan adanya penghematan terkait belanja operasional kantor, penurunan beban barang terkait penanganan Covid 19 dikarenakan masa pandemic sudah berakhir, penurunan beban honor output kegiatan disebabkan pos anggaran honor pokja pengadaan lelang yang lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya dikarenakan pagu blokir untuk beberapa pengadaan belanja modal, penurunan beban telepon disebabkan penggunaan telepon yang sudah jarang digunakan oleh kantor beralih ke ponsel selular, serta penurunan pada beban jasa lainnya yang disebabkan berkurangnya kegiatan BKKPN yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa kegiatan/ *Event Organizer* di tahun 2023 dibanding sebelumnya.

Walaupun sebagian besar beban barang dan jasa mengalami penurunan, terdapat beban Listrik dan jasa profesi yang meningkat karena disebabkan meningkatnya aktivitas pelayanan, peningkatan beban pengiriman surat dinas Pos Surat disebabkan frekuensi pengiriman berkas dokumen yang meningkat serta terbatasnya jasa ekspedisi pada beberapa wilayah kerja BKKPN Kupang, kenaikan beban bahan disebabkan peningkatan frekuensi penggunaan Kapal Pemantau Kawasan Konservasi sehingga membutuhkan banyak ketersediaan BBM dan Pelumas, Beban barang Non Operasional Lainnya mengalami kenaikan dibanding tahun 2023 disebabkan terdapatnya pembebanan biaya Pengiriman Alat Pendukung Pemantauan yang dikirimkan dari Kupang ke Wilayah kerja Banda Neira, beban langganan air meningkat disebabkan adanya peningkatan pelayanan berupa penambahan beberapa gerai pelayanan yang terdapat di TWP Gili Matra, Beban langganan daya dan jasa lainnya meningkat disebabkan penambahan beberapa jaringan nirkabel/ *wifi* pada Kantor & wilker BKKPN untuk mengoptimalkan layanan pada aplikasi pungutan PNBK SEAPARK, beban sewa mengalami peningkatan disebabkan penambahan gerai Layanan dan

kenaikan tarif sewa tahunan Kantor Wilker BKKPN Kupang, Beban Jasa Profesi mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 disebabkan frekuensi kegiatan seperti Bimtek dan Sosialisasi yang membutuhkan Narasumber dari luar K/L banyak dilaksanakan pada 2023 dan peningkatan Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin pada 2023 yang terbentuk atas belanja Modal Peralatan Survei Kawasan Konservasi dimana terdapat beberapa item barang yang bernilai dibawah nilai Kapitalisasi.

Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Keperluan Perkantoran	2.148.721.387	2.449.608.887	(12,28)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	30.383.600	16.179.320	87,79
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	153.838.000	144.192.000	6,69
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	4.569.485	(100,00)
Beban Bahan	2.240.944.926	1.989.418.311	12,64
Beban Honor Output Kegiatan	8.160.000	11.580.000	(29,53)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	18.700.000	281.576.245	(93,36)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	8.442.300	49.573.170	(82,97)
Beban Langganan Listrik	182.576.547	170.617.838	7,01
Beban Langganan Telepon	7.371.479	4.345.004	69,65
Beban Langganan Air	7.683.987	4.135.201	85,82
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	226.340.700	159.581.416	41,83
Belanja Jasa Konsultan	149.933.250	0	100,00
Beban Sewa	2.031.465.000	1.807.140.000	12,41
Beban Jasa Profesi	49.700.000	84.450.000	(41,15)
Beban Jasa Lainnya	810.252.634	2.128.894.118	(61,94)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel	54.327.980	78.120.218	(30,46)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	16.124.188	(100,00)
Jumlah Beban	8.128.841.790	9.400.105.401	(13,52)

Pada tahun 2023 terdapat anggaran belanja penanggulangan covid19 pada BKKPN Kupang, yang dianggarkan pada awal tahun senilai Rp.64.535.000,- yang terdiri dari 3 akun belanja yakni:

- Akun 521131 – Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID19. Peruntukan akun belanja tersebut untuk pembelanjaan Bahan Disinfektan guna pencegahan covid 19. Dianggarkan sebesar 14.215.000, dan direvisi menjadi 0 pada bulan Juli 2023 dikarenakan tidak terdapat belanja bahan disinfektan.

- Akun 521241 – Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid19. Peruntukan akun belanja tersebut untuk pembelanjaan Masker/Hand Sanitizer. Dianggarkan pada awal tahun sebesar 40.320.000 dan direvisi menjadi 6.570.000 pada bulan Oktober 2023.

Sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-24/PB/PB.6 /2023 tentang Penggunaan Akun Khusus Covid 19 tanggal 24 Agustus 2023, penggunaan akun covid dibatasi sampai dengan semester I 2023. Namun pada satker BKKPN Kupang terdapat realisasi pada akun 521241 pada tanggal 22 Agustus 2023 senilai 1.952.700. Atas hal tersebut sudah dilakukan koreksi pada bulan Oktober 2023, semula realisasi akun 521241 sebesar 8.460.000 menjadi 6.507.300.

- Akun 522192 – Belanja Jasa – Penanganan Pandemi COVID19. Peruntukan akun belanja tersebut untuk Rapid Test/Swab PCR. Anggaran akun 522192 direvisi menjadi 0 pada bulan Desember 2022, sebelum anggaran tersebut aktif untuk digunakan di TA 2023.

Detail komposisi anggaran dan realisasi akun terkait Covid19:

No.	Uraian Akun	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Sisa
1	521131 - Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	14.215.000	-	-	-
2	521241 - Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	40.320.000	6.570.000	6.507.300	62.700
3	522192 - Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	10.000.000	-	-	-
TOTAL		64.535.000	6.570.000	6.507.300	62.700

Beban

D.5 Beban Pemeliharaan

Pemeliharaan Rp

1,533,989,758

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp 1,533,989,758** dan **Rp 1,215,735,056**. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban Pemeliharaan sebesar 26,18% dibanding tahun 2022 dikarenakan adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas asset – asset lama. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan

TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	749.853.000	429.815.063	74,46
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	784.136.758	785.919.993	(0,23)
Jumlah Beban	1.533.989.758	1.215.735.056	26,18

**Beban
Perjalanan
Dinas
Rp
4,666,396,547**

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp 4,666,396,547** dan **Rp 4,620,517,950**. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Peningkatan beban perjalanan dinas sebesar 0,99% dibanding tahun 2022. Diantaranya pada realisasi belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota pada kegiatan Bimtek Pengelola Kawasan Konservasi, Bimbingan Teknis Penyediaan Data Hasil Survei Biota Laut Dilindungi dan realisasi perjalanan dinas luar negeri untuk kegiatan Marine Spatial Planning Workshop Training, di Xiamen, Fujian, China bulan Desember 2023.

Rincian Beban Perjalanan Dinas

TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Perjalanan Biasa	3.132.497.467	3.197.288.300	(2,03)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.231.976.225	1.212.139.650	1,64
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	31.900.000	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	246.210.000	179.190.000	37,40
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	55.712.855	0	100,00
Jumlah Beban	4.666.396.547	4.620.517.950	0,99

**Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp184,751,054**

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp184,751,054** dan **Rp199,603,863**. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	184.751.054	199.603.863	(7,4
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,
Jumlah Beban	184.751.054	199.603.863	(7,4

Barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada 2023 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Barang Pekerjaan Pengadaan Bantuan Kompak untuk Kemitraan Kawasan Konservasi Pulau Gili Matra sesuai BAST No. BAST.587/BKKPN.PPK/PL.450/VI/2023, tgl 20 Juni 2023, BAP No. BA P.592/BKKPN.PPK/PL.450/VI/2023 tgl 21 Juni 2023. Barang telah diserahkan kepada Kelompok Meno Lestari yang berada di Pulau Gili Meno, Desa Gili Indah pada tanggal 21 Juni 2023 dengan Berita Acara Penyerahan ke kelompok nomor B.2165/BKKPN/ PRL.440/VI/2023 berupa peralatan selam.
2. Belanja barang pekerjaan pengadaan bantuan kompak untuk Kemitraan Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu sesuai BAST No. BAST.512/BKKPN.PPK/PL.450/V/2023 Tanggal 25 Mei 2023, BAP NO.BAP.518/ BKKPN.PPK /PL.450/V/2023 tanggal 26 Mei 2023. Barang telah diserahkan kepada kelompok Yayasan KOPPESDA yang berada di desa Mondu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur dengan Berita Acara Penyerahan Barang nomor B.2226/BKKPN/ PRL.440/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023. Detail barang yang diserahkan ke masyarakat berupa Bak Penampung sampah dan Motor roda tiga untuk pengangkut sampah.
3. Belanja barang bantuan KOMPAK kepada Ketua Yayasan

Cahaya Samudera Indonesia dengan BAST nomor B.2781/BKKPN/PRL.440/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023. Bantuan diserahkan kepada Masyarakat kelompok penggerak konservasi di Desa Kampung Baru, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku berupa Mesin & Longboat Fiber pengangkut sampah.

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan Tahun 2022
(dalam rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	0	0	0,00
Jumlah Beban	0	0	0,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 3,195,756,377

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp 3,195,756,377** dan **Rp 2,778,712,927**. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2023 dan Tahun 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.724.655.339	2.208.747.839	23,36
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	173.049.163	168.507.795	2,70
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan Irigasi dan Jaringan	109.106.312	141.439.346	(22,86)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam operasi pemerintah	188.945.563	260.017.947	(27,33)
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Beban	3.195.756.377	2.778.712.927	15,01

Beban Penyisihan D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Piutang Tak

Tertagih Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 2022 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			
- Piutang Lancar	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			
- Piutang Non Lancar	0	0	0,00
Jumlah Beban	0	0	0,00

Kegiatan Non

Operasional Rp

63,334,884

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp 63,334,884** dan **Rp (3,970,411,727)**. Rinciannya adalah sebagai berikut;

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	62.034.884	154.550.000	(59,86)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	(4.184.725.203)	(100,00)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.300.000	59.763.476	(97,82)
Jumlah Beban	63.334.884	(3.970.411.727)	(101,60)

- a. Pendapatan Pelepasan aset non lancar tahun 2023 merupakan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (Kode akun 425122). Detail pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin sebagai berikut:

No.	Nomor Risalah Lelang	Uraian BMN yang dilelang	NTPN	NTB	Tanggal	Nominal
1	108/69/2023 27 Maret 2023	1 Paket LCD	C5E6248VW5CFRBMU	230404815352	04 April 2023	2.123.999
		1 PAKET AC Split				510.000
		1 Unit Kamera Udara (Drone)				1.888.888
		1 Paket Handy Talky				3.500.000
		1 Unit Skuter Selam				2.123.999
2	109/69/2023 27 Maret 2023	1 Paket sisa puing dan Mesin Kapal Pemantau TNP Laut Sawu	1B0A948VW5A9PKD8	230330926576	30 March 2023	17.999.999
3	110/69/2023 27 Maret 2023	Stationery Generating Set	B2FF58N3EA8CSKRP	230403651871	03 April 2023	24.999.999
4	111/69/2023 27 Maret 2023	1 Paket Instalasi Air Bersih	52D173CIFANS7HIP	230329661495	29 March 2023	8.888.000
TOTAL						62.034.884

- b. Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya tahun 2023 merupakan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (Kode Akun 425912) yang berasal dari Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2022 yang terjadi akibat kesalahan dobel pencatatan kwitansi hingga terbit SP2D atas kwitansi tersebut senilai total Rp.1.300.000. Transaksi tersebut disetor ke Kas Negara pada tanggal 9 Februari 2023 dengan rincian:
- Pengembalian kelebihan belanja barang tahun anggaran yang lalu berupa pembayaran atas belanja perjalanan dinas dan belanja bahan dalam rangka pendataan morfometrik dan TKG Ikan KKPN SAP Aru Tenggara tanggal 15 Agustus 2022, nomor kwitansi 2928 dengan NTPN 92C1F61QUQBF1GIU, NTB 000000678404 tanggal 9 Februari 2023 senilai Rp.650.000,-
 - Pengembalian kelebihan belanja barang tahun anggaran yang lalu berupa pembayaran atas belanja perjalanan dinas dan belanja bahan sampel ikan dalam rangka pendataan morfometrik dan TKG ikan pada kantor

BKKPN Kupang wilker Manggarai tanggal 9 Desember 2022, kwitansi nomor 4298 dengan NTPN F59E161QUQBF1H5M, NTB 000000723804 senilai Rp.650.000,-.

Pos Luar Biasa

Rp0

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023 dan 2022.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp 35,135,924,543

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp35.135.924.543** dan **Rp 37.759.324.847**

Defisit LO

Rp

(22,525,721,315)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah deficit sebesar **Rp(22,525,721,315)** dan **Rp (28,159,198,391)**. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/deficit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif

Perubahan

Kebijakan

Akuntansi

Rp0

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp0**.

Penyesuaian Nilai

Aset Rp0

E. 4. 1. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp0

E. 4. 2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Rincian Nilai Persediaan untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Persediaan	Koreksi
1	Barang Konsumsi	-
2	Suku Cadang	-
	Jumlah	-

Selisih Revaluasi

E. 4. 3 Selisih Revaluasi Aset

Aset

Rp0

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**

Koreksi Aset Tetap

E. 4. 4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Non Revaluasi

Rp0

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Koreksi Lain-Lain

E. 4. 5 Koreksi Lain-Lain

Rp0

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0** Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar

E. 5 Transaksi Antar Entitas

Entitas

Rp 22,298,289,295

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp 22,298,289,295** dan **Rp 25,590,050,512**. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Transaksi Antar Entitas TA 2022

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(2.433.018.634)
Ditagihkan ke Entitas Lain	24.731.307.929
Transfer Keluar	
Transfer Masuk	
Pengesahan Hibah Langsung	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
Jumlah	22.298.289.295

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E. 5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar **Rp(2,433,018,634)** sedangkan DKEL sebesar **Rp 24,731,307,929**.

E. 5. 2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 **Rp0**. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar **Rp0**.

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar **Rp0**. dari total **Rp0** (jika beda nilainya, ditulis manual) yang

diterima sepanjang Tahun 2022.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah **Rp0**

Ekuitas Akhir

Rp. 34,908,492,523

E. 6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing Adalah sebesar **Rp 34,908,492,523** dan **Rp 35,135,924,543,-**

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.

F. 1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat Utang kepada Pihak Ketiga senilai 24,910,442 yang merupakan Belanja yang masih harus dibayar atas tagihan pemakaian langganan Listrik, Daya dan Jasa Lainnya (Internet), Telepon dan Air yang pembayarannya dilakukan pada bulan Januari 2024.

F. 2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan KEP.40/MEN/KU.611/2020 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Keputusan Menteri KP Nomor B.1/BKKPN/KU.110/1/2023, dan B.2/BKKPN/I/2022 Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran : Imam Fauzi, S.S, M.Eng
Pejabat Pembuat Komitmen : Imam Fauzi, S.S, M.Eng
Pejabat Penandatanganan Surat : Muhammad Ramli Firman, S.T,
Perintah Membayar M.T
Bendahara Pengeluaran : Mohammad Akhid Yunanto,
S.PWK

Bendahara Penerimaan : Amos Moi Ponggallo, S.Pi
Per tanggal 4 April 2023, berdasar Keputusan kepala Balai atas nama MKP Nomor B.1203/BKKPN/KU.110/III/2023 perihal Perubahan Pertama atas penetapan PPK dan PPSPM terdapat perubahan Pejabat Pengelola Keuangan TA 2023 dengan detail sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran : Imam Fauzi, S.S, M.Eng
Pejabat Pembuat Komitmen : Muhammad Ramli Firman, S.T,
M.T
Pejabat Penandatanganan Surat : Ika Rakhmad Satria, SE
Perintah Membayar
Bendahara Pengeluaran : Mohammad Akhid Yunanto,

S.PWK

Bendahara Penerimaan : Amos Moi Ponggalo, S.Pi

2. Alokasi Anggaran Belanja Kantor Balai Kawasan Konservasi perairan Nasional (BKKPN) Kupang tahun 2023 sebesar 25.788.288.000 yang terdiri dari 2 (dua) sumber dana Rupiah Murni dan PNBPN dengan nomor DIPA SP DIPA- 032.07.2.499352/2023 tanggal 30 November 2022. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 masih terdapat alokasi Pagu Anggaran yang masih dilakukan Blokir (*Non Automatic Adjustment*) dengan keterangan kegiatan tidak relevan dengan pencapaian target RO senilai total **Rp.700.000.000** pada rincian output 2362.REA.003 - Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan Secara Berkelanjutan.

No.	Kegiatan/ KRO	KODE	Jenis Belanja	Nominal
1	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	2362		
-	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	2362.REA		
-	Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan Secara Berkelanjutan	2362.REA.003	Belanja Barang - 52	700.000.000
TOTAL				700.000.000

Rentang periode sampai dengan 31 Desember 2023, terdapat 8 kali revisi DIPA dengan rincian sebagai berikut:

No.	Revisi ke	Tanggal Pengesahan	DIPA Awal	DIPA Perubahan	Alasan Revisi
1	01	24 Desember 2022	27.161.936.000	27.161.936.000	Pencantuman/Penghapusan/ Perubahan Catatan Halaman IV .A (USULAN <i>AUTOMATIC ADJUSTMENT</i>)
2	02	15 Februari 2023	27.161.936.000	27.161.936.000	- Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA (Updating) - Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
3	03	13 April 2023	27.161.936.000	27.161.936.000	- Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA (Updating) - Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
4	04	11 Juli 2023	27.161.936.000	27.161.936.000	- Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA (Updating) - Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
5	05	30 Agustus 2023	27.161.936.000	28.802.486.000	- Penambahan PAGU PNPB senilai 1.640.550.000 - Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan - Volume keluaran (<i>Output</i>) berubah.
6	06	12 Oktober 2023	28.802.486.000	28.802.486.000	- Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA (Updating) - Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
7	07	19 Oktober 2023	28.802.486.000	26.152.486.000	- Penambahan/Pengurangan Alokasi dan/atau Target RO Prioritas Nasional - Pencantuman/ Penghapusan/ Perubahan Catatan Halaman IV .A (Buka Blokir)
8	08	9 November 2023	28.802.486.000	25.788.288.000	- Terdapat pergeseran antar jenis belanja, antar satker dan dalam 1 (satu) satker dalam rangka pemenuhan belanja barang operasional diantaranya untuk pembayaran listrik, pemeliharaan kantor, dan penataan halaman kantor. - Pergeseran anggaran antar satker dalam satu jenis belanja dalam rangka pemenuhan kekurangan gaji dan tunjangan pada Satker BPSPL Denpasar

Detail perubahan anggaran BKKPN Kupang sebagai berikut:

MAK	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Sumber Dana
2362	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	13.675.000.000	12.815.550.000	
2362.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	300.000.000	671.391.000	RM & PNPB
2362.PEE	Kemitraan	100.000.000	100.000.000	RM
2362.QEH	Bantuan Kelompok Masyarakat	325.000.000	325.000.000	RM
2362.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	-	1.269.159.000	PNBP
2362.REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	12.500.000.000	10.000.000.000	RM & PNPB
2362.REB	Konservasi Jenis/Spesies	100.000.000	100.000.000	RM
2362.SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	350.000.000	350.000.000	RM
2366	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	500.000.000	350.000.000	
2366.PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	500.000.000	350.000.000	RM
2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen P	12.986.936.000	12.622.738.000	
2367.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	12.285.436.000	11.921.238.000	RM
2367.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	268.000.000	268.000.000	RM
2367.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	433.500.000	433.500.000	RM
TOTAL		27.161.936.000	25.788.288.000	

3. Realisasi Anggaran belanja BKKPN Kupang pada TA 2023 senilai **24,731,307,929** dari PAGU Anggaran sebesar **25,788,288,000** atau senilai **95,90%**.

Jika dibandingkan dengan Pagu diluar Blokir senilai **25,088,288,000**, realisasi TA 2023 senilai **24,731,307,929** atau sebesar prosentase **98,58%**.

Rincian Realisasi berdasarkan Jenis Belanja:

- Realisasi Belanja Pegawai 5,004,553,211 dari Pagu belanja Pegawai 8,111,936,000 atau sebesar 61,69%;
- Realisasi Belanja Barang 9,311,876,886 dari Pagu Belanja Barang 15,878,450,000 atau sebesar 58,64% (67,69% dari pagu diluar blokir);
- Realisasi Belanja Modal 1,940,121,171 dari Pagu Belanja Modal 3,765,488,000 atau sebesar 40,67% (99,56% dari pagu diluar blokir).

4. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak BKKPN Kupang pada TA 2023 sebesar 2,433,018,634 dari pagu/ target Penerimaan TA 2023 senilai 294,475,000 atau sebesar 826,22%.

Penerimaan Negara Bukan Pajak pada BKKPN Kupang terdiri dari beberapa pos sumber penerimaan, dengan detail sebagai berikut:

No.	Kode Akun	Uraian	Target Penerimaan	Nominal	% Realisasi Pendapatan
1	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	62.034.884	0,00
2	425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	294.475.000	2.369.683.750	804,71
3	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1.300.000	0,00
TOTAL			294.475.000	2.433.018.634	826,22%

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar 62.034.884 merupakan hasil penjualan lelang barang yang telah dihapuskan dari Aset BKKPN Kupang. Detail pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin sebagai berikut:

No.	Nomor Risalah Lelang	Uraian BMN yang dilelang	NTPN	NTB	Tanggal	Nominal
1	108/69/2023 27 Maret 2023	1 Paket LCD	C5E6248VV5CFRBMU	230404815352	04 April 2023	2.123.999
		1 PAKET AC Split				510.000
		1 Unit Kamera Udara (Drone)				1.888.888
		1 Paket Handy Talky				3.500.000
		1 Unit Skuter Selam				2.123.999
2	109/69/2023 27 Maret 2023	1 Paket sisa puing dan Mesin Kapal Pemantau TNP Laut Sawu	1B0A948VV5A9PKD8	230330926576	30 March 2023	17.999.999
3	110/69/2023 27 Maret 2023	Stationery Generating Set	B2FF58N3EA8CSKRP	230403651871	03 April 2023	24.999.999
4	111/69/2023 27 Maret 2023	1 Paket Instalasi Air Bersih	52D173CIFANS7HIP	230329661495	29 March 2023	8.888.000
TOTAL						62.034.884

Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya berasal dari Karcis Masuk Pariwisata Alam Kawasan Konservasi Perairan (Domestik & Mancanegara) beserta Sarana yang dibawa, Tanda Masuk Pendidikan dan Tanda Masuk Penelitian di Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang rentang periode 1 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023 dengan detail sebagai berikut:

No.	Kawasan	Jenis Pungutan					Nominal
		Karcis Masuk PAP			TM Pendidikan	TM Penelitian	
		Domestik	Mancanegara	Sarana yang Dibawa			
1	TNP Laut Sawu	20.000	2.275.000	2.716.250	-	200.000	5.211.250
2	TWP Gili Matra	5.720.000	2.057.200.000	5.000	520.000	3.100.000	2.066.545.000
3	TWP Kapoposang	590.000	500.000	13.156.250	-	-	14.246.250
4	TWP Laut Banda	20.000	15.300.000	4.093.750	-	200.000	19.613.750
5	TWP Kep. Padaido	30.000	300.000	55.000	-	-	385.000
6	SAP Raja Ampat	212.500	9.425.000	22.428.750	10.000	100.000	32.176.250
7	SAP Waigeo	1.375.000	137.280.000	92.751.250	-	-	231.406.250
8	SAP Aru Tenggara	-	-	-	-	100.000	100.000
TOTAL		7.967.500	2.222.280.000	135.206.250	530.000	3.700.000	2.369.683.750
		Rp2.365.453.750					
		99,82%					
Prosentase Besaran PNB Per Jenis Pungutan		0,34%	93,78%	5,71%	0,02%	0,16%	

Tarif pungutan pada karcis masuk kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan sampai dengan 20 Desember 2023 masih diberlakukan sesuai dengan besaran tarif pada PermenKP 35 tahun 2021 yakni sebesar 25% dari tarif sesuai PP 85 Tahun 2021. Sesuai dengan PermenKP 35 tahun 2023, diberlakukan sampai dengan 6 (enam) bulan setelah masa tanggap darurat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) selesai berdasarkan penetapan dari Pemerintah. Per 21 Juni 2023 pandemi secara resmi berakhir, bersamaan dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang penetapan berakhirnya status pandemi Corona Wrus Disease 2019 (*covid-19*) di Indonesia. Sehingga penerapan tarif penuh sesuai PP 85 tahun 2021 diberlakukan tanggal 21 Desember 2023.

Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL berasal dari penyetoran ke Kas Negara atas kesalahan dobel pencatatan kwitansi hingga terbit SP2D atas kwitansi tersebut senilai total Rp.1.300.000.. Transaksi tersebut disetor ke Kas Negara pada tanggal 9 Februari 2023 dengan rincian:

- Pengembalian kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas dan belanja bahan sampel ikan dalam rangka pendataan morfometrik dan TKG Ikan KKPN SAP Aru Tenggara tanggal 15 Agustus 2022, nomor kwitansi 2928 dengan NTPN 92C1F61QUQBF1GIU, NTB 000000678404 tanggal 9 Februari 2023 senilai Rp.650.000,-;
 - Pengembalian kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas dan belanja bahan sampel ikan dalam rangka pendataan morfometrik dan TKG ikan pada kantor BKKPN Kupang wilker Manggarai tanggal 9 Desember 2022, kwitansi nomor 4298 dengan NTPN F59E161QUQBF1H5M, NTB 000000723804 senilai Rp.650.000,-.
5. Pada tahun 2023 terdapat anggaran belanja penanggulangan covid19 pada BKKPN Kupang, yang dianggarkan pada awal tahun senilai Rp.64.535.000,- yang terdiri dari 3 akun belanja yakni:
- Akun 521131 – Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID19. Peruntukan akun belanja tersebut untuk pembelian Bahan Disinfektan guna pencegahan covid 19. Dianggarkan sebesar 14.215.000, dan direvisi menjadi 0 pada bulan Juli 2023 dikarenakan tidak terdapat belanja bahan disinfektan.
 - Akun 521241 – Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid19. Peruntukan akun belanja tersebut untuk pembelian Masker/Hand Sanitizer. Dianggarkan pada awal tahun sebesar 40.320.000 dan direvisi menjadi 6.570.000 pada bulan Oktober 2023.

Sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-24/PB/PB.6 /2023 tentang Penggunaan Akun Khusus Covid 19 tanggal 24 Agustus 2023, penggunaan akun covid dibatasi sampai dengan semester I 2023. Namun pada satker BKKPN Kupang terdapat realisasi pada akun 521241 pada tanggal 22 Agustus 2023 senilai 1.952.700. Atas hal tersebut sudah dilakukan koreksi pada bulan Oktober 2023, semula realisasi akun 521241 sebesar 8.460.000 menjadi 6.507.300.

- Akun 522192 – Belanja Jasa – Penanganan Pandemi COVID19. Peruntukan akun belanja tersebut untuk Rapid Test/Swab PCR. Anggaran akun 522192 direvisi menjadi 0 pada bulan Desember 2022, sebelum anggaran tersebut aktif untuk digunakan di TA 2023.

Detail komposisi anggaran dan realisasi akun terkait Covid19:

No.	Uraian Akun	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Sisa
1	521131 - Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	14.215.000	-	-	-
2	521241 - Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	40.320.000	6.570.000	6.507.300	62.700
3	522192 - Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	10.000.000	-	-	-
TOTAL		64.535.000	6.570.000	6.507.300	62.700

6. Dalam pengelolaan uang persediaan, BKKPN Kupang menggunakan Rekening Virtual dengan nomor rekening 9891344993521000 BPG 039 BKKPN KUPANG sebagai rekening pengelolaan Uang Persediaan. Surat Persetujuan Penggunaan rekening dari KPPN Kupang Nomor S-2769/WPB.12/KP.03/2020/039 tanggal 21 Oktober 2020 atas penggunaan rekening virtual untuk menampung Uang Persediaan.

1. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, terdapat beberapa pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan BKKPN Kupang yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal KKP dan Badan Pemeriksa Keuangan RI, dengan detail sebagai berikut:

- a. Pada bulan Januari 2023 terdapat pengawasan berupa Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan, Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), dan Persediaan tahun 2022 pada Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana Surat Tugas Plt. Inspektur Jenderal (Irjen) KKP Nomor ST-11.01.1/ITJ/TU.350/I/2023, tanggal 11 Januari 2023.
- b. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Satker Lingkup Kementerian kelautan dan Perikanan TA 2022 tanggal 10 s.d 18 Februari 2023.
- c. Audit Kinerja sesuai Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor B.752.1/ITJ.3/KP.440/VII/2023, tanggal 27 Juli 2023 tentang melaksanakan Audit Kinerja TA 2022 – 2023 pada BKKPN Kupang.

Sampai dengan 31 Desember 2023, BKKPN Kupang telah menyelesaikan seluruhnya kewajiban pertanggungjawaban atas temuan BPK RI dan Itjen KKP dan tidak terdapat temuan yang mengakibatkan kerugian negara/ setoran ke kas negara.

8. Per 31 Desember 2023 terdapat Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan senilai Rp. 12.579.722.652 dan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan senilai 334.636.900. Nilai tersebut tercatat sebagai aset lain-lain sebesar 12,914,359,552. Suatu aset tetap dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dikarenakan kondisinya yang rusak berat, hilang, atau sebab lain yang mengakibatkan aset tetap tersebut tidak digunakan lagi dalam operasional pemerintah. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan selanjutnya dapat dilakukan proses penghapusan, digunakan kembali, atau dilakukan perubahan kondisi. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan tidak dapat dilakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan.

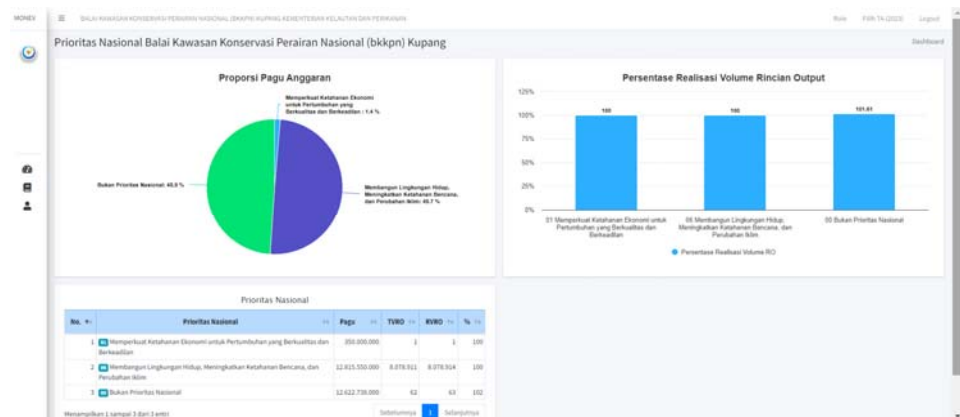
Selama tahun anggaran 2023, BKKPN Kupang telah melakukan inventarisir dalam rangka pengajuan usulan penghapusan atas barang yang dikategorikan sebagai henti guna pada aset BKKPN Kupang yang terdapat pada Kabupaten Pangkep, Sulawesi

Selatan (Wilayah Kerja TWP Kapoposang) dan Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya (Wilayah kerja SAP Raja Ampat dan Waigeo) pada tanggal 21 sd 31 Mei 2023.

Detail barang dilampirkan pada Lampiran Laporan Keuangan 2023.

9. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada satker BKKPN Kupang, Ditjen PKRL - Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu:

- 1) Prioritas Nasional (PN) VI – Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
- 2) Prioritas Nasional (PN) I - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.



Sampai dengan 31 Desember 2023, realisasi program prioritas Nasional sebagai berikut:.

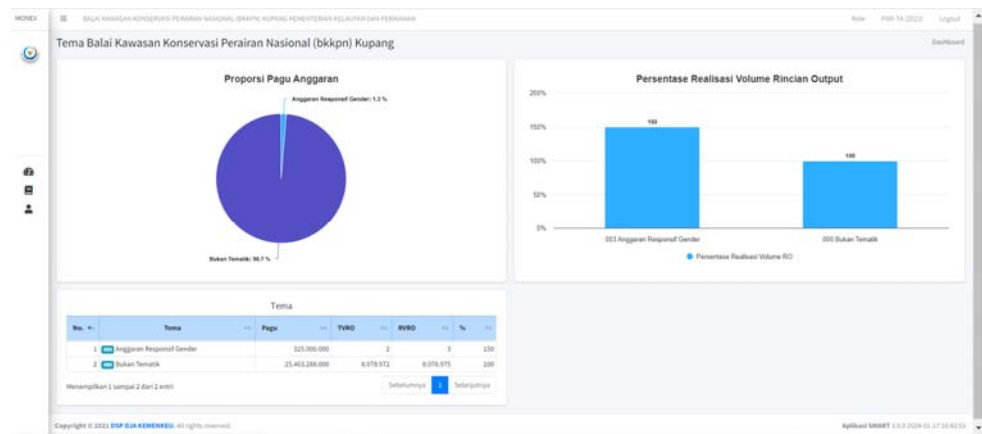
Nama Satker	Program/ Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategi	Target	Capaian Output Strategis	%
Prioritas Nasional VI - Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim								
BKKPN Kupang	Program Kualitas Lingkungan Hidup - Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati	12.815.550.000	11.961.684.077	93,34%				
	- Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	671.391.000	651.087.643	96,98%	Rekomendasi Kebijakan	1	1 Rekomendasi Kebijakan	100%
	- Jejaring dan Kemitraan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	100.000.000	96.721.196	96,72%	Kesepakatan	1	3 Kesepakatan	100%
	- Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	325.000.000	311.025.578	95,70%	Kelompok Masyarakat	2	3 Kelompok Masyarakat	100%
	- Sarana Pendukung Penyelenggaraan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	1.269.159.000	1.268.605.619	99,96%	Unit	4	4 Unit	100%
	- Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Operasional	9.300.000.000	9.186.422.795	98,78%	Hektar	4.039.436	4.039.436 Hektar	100%
PAGU BLOKIR	- Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan Secara Berkelanjutan	700.000.000	-	0,00%	Hektar	4.039.436	4.039.436 Hektar	100%
	- Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan	100.000.000	98.006.539	98,01%	Jenis	1	1 Jenis	100%
	- Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya	350.000.000	349.814.707	99,95%	Orang	30	30 Orang	100%
Prioritas Nasional I - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan								
BKKPN Kupang	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan - Perencanaan Ruang Laut	350.000.000	349.595.682	99,88%				
	- Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	350.000.000	349.595.682	99,88%	Rekomendasi Kebijakan	1	1 Rekomendasi Kebijakan	100%
TOTAL		13.165.550.000	12.311.279.759	93,51%				

**Data Capaian Output strategis berdasarkan capaian output Satker BKKPN Kupang bulan Desember 2023 yang sudah terkonfirmasi di OMSPAN.*

Di tahun 2023, satuan kerja BKKPN Kupang mengelola anggaran tematik Anggaran Responsif Gender (003) pada Klasifikasi Rincian Output (KRO) Bantuan Kelompok Masyarakat - Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi dengan nilai anggaran 325.000.000 dan target capaian 2 kelompok Masyarakat. Realisasi tahun 2023 terkait Anggaran Responsif Gender (003) sebagai berikut:

Nama Satker	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Satuan Rincian Output	Target	Capaian Rincian Output	%	Keterkaitan dengan PN
BKKPN Kupang	325.000.000	311.025.578	95,70%	Kelompok Masyarakat	2	3	150%	Prioritas Nasional VI – Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

**Data Capaian Output strategis berdasarkan capaian output Satker BKKPN Kupang bulan Desember 2023 yang sudah terkonfirmasi di OMSPAN.*



10. Sampai dengan 31 Desember 2023 masih terdapat catatan di To Do List MONSAKTI berupa Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB. Hal tersebut muncul dikarenakan terdapat pembelian belanja modal yang nilainya dibawah nilai Kapitalisasi (Satu Juta Rupiah) atas Pengadaan Peralatan Survei Kawasan Konservasi Perairan dengan nilai kontrak senilai Rp. 1.121.902.530 nomor kontrak SP. 56/BKKPN.PPK /PL.430/I/2023 tanggal 25/01/2023.

Pada pengajuan pembayaran ke 2 atas pengadaan tersebut melalui SPM 00059T/499352/2023 nomor & tanggal SP2D 230391303002640 31 Maret 2023 dengan uraian “ Pembayaran Sekaligus Belanja Modal Pekerjaan Pengadaan Peralatan Survei Kawasan Konservasi Perairan sesuai BAST No. BAST.369/BKKPN.PPK /PL.450/III/2023 tgl 24-03-2023, BAP No. BAP.377/BKKPN.PPK/PL.450/ III/2023 tgl 27-03-2023” senilai Rp. 785.331.771 terdapat 77 detail item barang yang nilainya dibawah nilai kapitalisasi dengan nilai total Rp.37.993.080 dan membentuk Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin pada pencatatan akrual sistem SAKTI.

Rincian nilai belanja modal dibawah nilai kapitalisasi sebagai berikut:

No.	Uraian barang	Kuantitas	Harga Satuan	Harga Total
1	Tas Kamera	4	999.000	3.996.000
2	Universal Clamp, Clamping Range 6 To 12 mm	2	555.000	1.110.000
3	Mesh Bag	8	888.000	7.104.000
4	Belt/Apron Feeder	8	198.690	1.589.520
5	Weight	31	111.000	3.441.000
6	Dive Boots	24	864.690	20.752.560
	TOTAL	77		37.993.080

Atas hal tersebut BKKPN menindaklanjuti dengan berkoordinasi ke KPPN Kupang pada tanggal 7 Juli 2023. Saran yang diberikan oleh KPPN Kupang terkait hal tersebut:

- a. Kesalahan satker merupakan kesalahan secara administratif, khususnya pada perencanaan yang tidak tepat dalam mengalokasikan anggaran belanja ekstrakomptabel sehingga Ketika pencatatan komitmen dicatat pada akun belanja modal saja.
- b. Untuk menuntaskan hal tersebut saran ideal dilakukan koreksi SPM dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran Pagu Kontrak serta pertimbangan resiko turunan akibat koreksi SPM tersebut.

Pada tanggal 6 September dilaksanakan koordinasi kembali ke KPPN Kupang. Informasi yang disampaikan oleh petugas di KPPN Kupang sebagai berikut:

- a. Koreksi berpotensi mengubah SPM menjadi 2 jenis belanja, yakni belanja barang untuk alokasi belanja ekstrakomptabel dan belanja modal untuk alokasi peralatan dan mesin.
- b. Pengadaan tersebut merupakan belanja kontraktual, dan telah selesai tagihannya. Koreksi terkait belanja kontraktual tidak bisa dilakukan karena kontrak yang sudah selesai tidak bisa dilakukan *addendum* kontrak.

Pada tanggal 20 Desember 2023, berdasarkan arahan dari Dit.SITP - Ditjen Perbendaharaan - Kemenkeu pada saat kegiatan Sosialisasi Langkah – Langkah akhir tahun 2023 di Jakarta terkait Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB telah dilakukan jurnal koreksi antar beban. Pencatatan jurnal dilakukan sebagai berikut:

Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel (D) 37.993.080

Belanja Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin (K) 37.993.080

11. Pada tahun 2023, BKKPN Kupang menyelenggarakan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang mempunyai tujuan bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat telah dilaksanakan dengan sistem pengendalian intern yang memadai. Pengendalian dilakukan dengan menetapkan 4 akun signifikan yang merupakan akun beresiko atau berpotensi tinggi salah saji dalam pelaporan keuangan sebagai berikut:

a. Akun 111611 Kas di Bendahara Pengeluaran, pengendalian dilakukan pada proses Pencatatan Uang Persediaan Tunai, Pencatatan Penarikan dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Tunai, Rekonsiliasi Internal, Pencatatan transaksi Uang Persediaan KKP, Pelaporan Kas di Bendahara Pengeluaran, Pengungkapan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Catatan Atas Laporan Keuangan. Resiko utama dari akun ini adalah:

- Adanya perbedaan pencatatan Uang Persediaan antara Pengelola Administrasi Wilker/ PUMK dan BP.
- Adanya kesalahan pencatatan kodefikasi (KRO/RO/akun/ komponen/sub komponen/detail akun).
- Adanya perbedaan Cash Opname dengan yang tercatat pada PUMK/Pengelola Administrasi Keuangan Wilker, dengan BP.
- Adanya saldo Bank tercatat lebih pada Kas di Bendahara Pengeluaran.
- Adanya saldo Kas yang tidak sesuai dengan pencatatan di Aplikasi SAKTI Modul Bendahara (TDK Kas).
- Adanya informasi yang kurang memadai terkait Kas di Bendahara Pengeluaran di dalam Catatan Laporan Keuangan.

b. Akun 117124 Persediaan Peralatan dan Mesin yang Diserahkan ke Masyarakat. Pengendalian dilaksanakan pada proses Penginputan/Pencatatan Transaksi Belanja, Pengungkapan Catatan Atas Laporan Keuangan dan Pengungkapan informasi Persediaan Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat pada Catatan laporan keuangan. Resiko utama terkait akun ini sebagai berikut:

- Dokumen sumber belum dicatat.
- Terdapat kesalahan peinputan kode barang, nilai persediaan, volume, tanggal dan nomor SP2D, kode MAK dan jenis persediaan.
- Terdapat ketidaksesuaian rincian persediaan yang diinput dengan rincian persediaan pada lampiran BAST.
- Terdapat barang persediaan yang dikeluarkan dari buku persediaan sebelum atau tanpa dokumen BAST dari KPB kepada penerima bantuan.
- Perbedaan nilai persediaan yang tercantum pada SAKTI-Modul Persediaan dan Modul GLP.
- Perbedaan nilai belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat dengan beban Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat yang tercantum pada Aplikasi SAKTI Modul GLP.
- Belum tersediannya informasi yang memadai terkait Persediaan Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat.

c. Akun 132111 - Peralatan dan Mesin. Pengendalian dilaksanakan pada proses Pencatatan Barang sesuai BAST, Pendetailan Barang, Pelaporan Aset dan Pengungkapan pada CaLK. Resiko utama yang berpotensi terjadi pada akun ini adalah:

- Kesalahan pemilihan kode barang dan kesalahan penginputan nilai pada modul komitmen.
- Kode barang pada aplikasi SAKTI modul komitmen berbeda dengan aplikasi SAKTI modul aset.

- Perbedaan antara spesifikasi (jumlah dan jenis) barang yang diterima dengan dokumen kontrak tahun berjalan.
 - Perbedaan antara Posisi Neraca SAKTI Modul GLP dengan Posisi BMN.
 - Adanya informasi yang kurang memadai terkait Peralatan dan Mesin pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. 425629 Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya. Pengendalian akun dilaksanakan pada proses Pencatatan Tagihan/Billing, Pencatatan transaksi di aplikasi SAKTI Modul Bendahara, Pelaporan PNBPN Pendapatan Jasa Kelautan Lainnya, Pengungkapan Catatan Atas Laporan Keuangan. Resiko utama yang berpotensi terjadi apabila akun tersebut tidak dikendalikan adalah sebagai berikut:
- Adanya Kesalahan pencatatan nilai tagihan pada Aplikasi SIMPONI.
 - Terdapat PNBPN yang belum dicatat pada Aplikasi SAKTI modul Bendahara.
 - Terdapat nilai selisih antara SIMPONI dan Aplikasi SAKTI modul Pelaporan.
 - Terdapat Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) pada aplikasi Monsakti.
 - Adanya informasi yang kurang memadai terkait terkait Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya di dalam CaLK.

12. Pada tahun 2023 terdapat beberapa jurnal penyesuaian, dengan rincian sebagai berikut:

- Jurnal Balik atas Belanja yang masih harus dibayar tahun 2022.
- Jurnal Penyesuaian atas belanja yang masih harus dibayar tahun 2023.
- Jurnal Koreksi antar beban atas Belanja Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin.

Pencatatan jurnal tersebut telah dilengkapi dengan memo

penyesuaian yang dilampirkan pada Catatan atas Laporan Keuangan 2023.

13. Pada periode sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat perbedaan antara Realisasi Anggaran belanja dengan beban yang terdapat di Laporan Operasional dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Beban (Akrual)	Belanja (Kas)	Selisih	Penjelasan
1	Persediaan Konsumsi	165.442.698	162.137.978	- 3.304.720	Merupakan selisih antara saldo awal senilai 4.108.500 - saldo akhir 31 Desember 2023 Barang Konsumsi senilai 803.780
2	Belanja Barang dan Jasa	423.972.713	423.920.710	- 52.003	- Selisih merupakan Utang kepada Pihak Ketiga atas belanja barang yang masih harus dibayarkan tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai 24,910,442 dan 24,858,439